

**EXECUTION of PASAL 13 HURUF M PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 ABOUT EXECUTION
LIFTING OF CHILD RELATED to CONDITION OBTAINING GET
PERMIT from SOCIAL HEAD INSTITUTION
BEFORE PROCESS LIFTING OF CHILD
(Research In Batu City)**

Ulul Asminarti,¹Sihabudin²,Itta Adrijani.³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Jl. Arjuno No. 24, Kelurahan Sisir – Kota Batu (65314)

Telp. 081233661090

Email: ululasminarti0@gmail.com

Abstract

This journal studies how Pelaksanaan Pasal 13 Letters M Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Related Chlid of Condition Obtains Permit From Head Of Social Institution Before Chlid Lifting Process. Thing surrounding this writing that there is contradiction between das sollen with das as of indium, das sollen in its(the research studying about Pengangkatan child of according to Section 13 letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Child and das as of indium in this research is Pengangkatan chlid done by M. Sugeng father lifts from Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, ineligible must obtain permit The Minister and/or social institution head beforehand. This thing indicates that has not there is straightening of correct law in the case of chlid lifting.

Problem studied in this research is: What execution of lifting of related chlid of condition obtains permit from social institution head before chlid lifting process . To answer problem studied the, writer applies approach method of yuridis empiric.

Based on result of research, writer obtains answers to the problems, that is Section 13 letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Chlid, doesn't run carefully. Many factors straightening of law is not executed.

Stands above mentioned things, Regulation of The Government of Number 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Chlid, must be given sanction, that public unwilling to do lifting of child of unmatched to procedure which has been specified by government. . Purpose of this research description to and analyses execution Section 13 Letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Related chlid of condition obtains permit from head Instansi Sosial before lifting process of child of evaluated from theory straightening of law.

Key words: *execution, child lifting, permit, social institution*

¹ Mahasiswa,Program Magister Kenotariatan,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang .

² PembimbingUtama,Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Kedua,Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,Malang.

Abstrak

Jurnal ini membahas bagaimana Pelaksanaan Pasal 13 Huruf M Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terkait Syarat Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Sebelum Proses Pengangkatan Anak. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa terdapat pertentangan antara *das sollen* dengan *das sein*, *das sollen* dalam penelitiannya membahas tentang Pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan *das sein* dalam penelitian ini adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh M. Sugeng bapak angkat dari Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, yang tidak memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penegakan hukum yang benar dalam hal pengangkatan anak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak terkait syarat memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak berjalan dengan baik. Banyak faktor penegakan hukum tidak terlaksana. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, harus diberikan sanksi, agar masyarakat segan untuk melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin kepala Instansi Sosial sebelum proses pengangkatan anak ditinjau dari teori penegakan hukum.

Kata kunci: pelaksanaan, pengangkatan anak, izin, instansi sosial

Latar Belakang

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian pelaksanaan adalah hal, cara atau hasil kerja melaksanakan.⁴ Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai penerapan atau implementasi dari ketentuan normatif pada peristiwa tertentu, tujuannya adalah sebagai hasil akhirnya. Tujuan yang dimaksud adalah terpenuhinya kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan hukum ditentukan dari nama dan isi aturan hukum itu sendiri berdasar sudut kefilosofatan. Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa karena masyarakat akan menerima hukum. Jika masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku mematuhi hukum. Hal itu sekaligus akan membawa akibat bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk melaksanakan dan menegakkannya. Jadi bisa dilihat bahwa hukum membawa hukum itu sendiri dari aspek sistematika. Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terkait Syarat Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Sebelum Proses Pengangkatan Anak. Sebelum membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan pasal tersebut, kita perlu mengetahui latar belakang mengapa masyarakat melakukan pengangkatan anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat. Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-

⁴ Rudy T. Erwin, **Kamus Bahasa Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 88.

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Sesungguhnya pemerintah mempermudah masyarakat, dan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, yakni dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Disebutkan bahwa “pengangkatan anak dapat dilaksanakan dengan syarat sudah memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak”.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam masyarakat telah terjadi beberapa penyimpangan dalam hal pengangkatan anak. Misalnya, ketika anak yang akan diangkat lahir, dibuatkan akta lahir sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya, sedangkan dalam Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak harus memenuhi syarat, yaitu sudah memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak.

Penelitian ini mengangkat permasalahan pengangkatan anak di masyarakat Batu. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan anak di masyarakat Batu belum sesuai dengan pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terkait Syarat Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Sebelum Proses Pengangkatan Anak.

Ketentuan yang berbeda, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum pengangkatan anak.

Penelitian ini memunculkan permasalahan bagaimana karakteristik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Batu dan kedudukan hukum yang ditimbulkan setelah pengangkatan anak.

Faktor atau latar belakang dilakukan pengangkatan anak, yaitu:⁵

1. keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
2. harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
3. masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
4. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Ditemukan bukti empiris, pada saat pra survey yang dilakukan peneliti, bahwa memang benar sering mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri tanpa mengurus izin dari Kepala Instansi Sosial sebelum proses pengangkatan anak. Peneliti menemukan data empiris antara lain:

1. Akta Kelahiran
2. Kartu Keluarga
3. Hasil Interview

⁵Budiarto, Muhammad, 1991, **Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum**, Jakarta: Melton Putra, Cetakan I. hlm.91

Hasil interview yang dilakukan peneliti di daerah, Kota Batu. Anak yang di angkat bernama “Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, dan bapak angkatnya bernama M. Sugeng Hariadi, berdasarkan interview dengan M. Sugeng, dinyatakan:⁶

“anak saya ini bukan anak kandung saya, anak ini anak dari adik saya, alasan saya mengangkat anak adalah untuk pancingan agar punya anak, karena saya menikah 4 tahun tidak dikaruniai anak.”

Berdasarkan Interview di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa pengangkatan anak yang biasa terjadi di masyarakat Jawa, masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkat tanpa memperoleh izin dari Kepala Instansi Sosial.

Hasil interview dengan Murdiono bapak angkat dari Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, ditemukan data menarik lagi, yakni:⁷

”anak angkat saya, di akta kelahiran atas nama saya dan istri sebagai orang tua kandung dan kami tidak ada izin dari Dinsos”

Pengakuan anak ini, sesungguhnya melanggar ketentuan Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di atas Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Instansi Sosial sebagaimana dimaksud adalah Dinas Sosial, banyak penyimpangan karena masih saja orang tua angkat memasukkan anak angkatnya kedalam akta kelahiran sebagai anak kandung.

Pengangkatan anak menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

⁶Wawancara dengan Warga Kota Batu, 14 Juni 2014.

⁷Wawancara dengan Warga Kota Batu, 14 Juni 2014.

- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Ketentuan Pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di atas Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Instansi Sosial sebagaimana dimaksud adalah Dinas Sosial.

Latar belakang di atas terdapat pertentangan antara *dos sollen* dengan *das sein*, dimana *das sollen* dalam penelitian ini adalah Pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan *das sein* dalam penelitian ini adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh M.Sugeng bapak angkat dari Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, yang tidak memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penegakan hukum yang benar dalam hal pengangkatan anak.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terkait Syarat Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Sebelum Proses Pengangkatan A Ditinjau dari teori Penegakan Hukum

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin

kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak. Pelaksanaan hukum ditentukan dari nama dan isi aturan hukum itu sendiri. Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa karena masyarakat akan menerima hukum. Jika masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku mematuhi hukum. Hal itu sekaligus akan membawa akibat bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk melaksanakan dan menegakkannya. Jadi bisa dilihat bahwa hukum membawa hukum itu sendiri dari aspek sistematika. Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.

Teori yang digunakan untuk menganalisis Pelaksanaan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak disini adalah teori penegakan hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁸

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.⁹

⁸Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor substansi hukum, dalam hal ini adalah undang-undang
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor-faktor penegakan hukum di atas bisa dijadikan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum seyogyanya diposisikan sebagai bagian dari kebijakan publik yang artinya didukung oleh *political will* pemerintah dan oleh aparaturnya penegak hukum diorientasikan kepada kepentingan masyarakat terutama kalangan masyarakat marginal.¹⁰

Ketentuan di atas dapat disimpulkan terdapat 5 Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. **Faktor Substansi Hukum**, dalam hal ini adalah Undang-Undang

Faktor Substansi Hukum sudah mengaturnya dengan jelas dan implisit dalam peraturan perundangan sudah bagus karena dengan adanya izin dari Dinsos untuk mengangkat anak berarti peraturan ini mencegah terjadinya penyimpangan dalam hal pengangkatan anak, namun tidak ada sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan tersebut. Pengangkatan anak menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan, Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;

¹⁰Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Pers Jakarta, 2010, hlm. 128.

- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Ketentuan Pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di atas Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat harus memperoleh izin kepala instansi sosial. Instansi Sosial sebagaimana dimaksud adalah Dinas Sosial. Substansi hukum sudah mengaturnya dengan jelas dan implisit dalam peraturan perundangan, namun tidak ada Sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan tersebut.

b. Faktor penegak hukum

Merujuk pada aturan mengenai pengangkatan anak yaitu Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak, sudah jelas bahwa orang tua angkat harus memperoleh izin dari Kepala instansi Sosial namun pada kenyataannya di Kota Batu masih banyak masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak tanpa ada izin dari Kepala Instansi Sosial. Penegak hukum dalam hal ini adalah para petugas instansi sosial atau para pegawai Dinas Sosial yang berperan dalam memberikan izin pengangkatan anak.

Berdasarkan wawancara di atas dengan bapak M. Sugeng Hariadi dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat tersebut masih banyak menyimpang karena masih saja orang tua angkat memasukkan anak angkatnya kedalam akta kelahiran sebagai anak kandung. Hal ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan dari penegak hukum dalam hal ini pegawai yang membuatkan akta kelahiran. Selain itu kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial tentang Prosedur Pengangkatan Anak yang benar. Pemerintah dalam hal ini adalah dinsos wajib melakukan sosialisasi ditempat-tempat berikut:

- 1) dikalangan masyarakat, misalnya di jalan-jalan.
- 2) lembaga pengasuhan;
- 3) rumah sakit bersalin;
- 4) praktek-praktek kebidanan; dan
- 5) dan panti sosial pengasuhan anak.

Selain sosialisasi mengenai prosedur pengangkatan anak sesuai Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di atas Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial, perlu juga dilakukan sosialisasi oleh Dinsos mengenai Tahapan dalam permintaan Izin Pengangkatan Anak seperti :

- 1) Tahapan Permintaan Izin Pengangkatan Anak.

Tahap ini calon orang tua angkat mendatangi kantor Dinas Kesejahteraan Sosial atau Instansi Sosial di wilayah tempat tinggalnya. Di Dinas Kesejahteraan Sosial ini, Calon Orang Tua Adopsi diberi informasi- informasi yang dibutuhkan, misalnya para Calon Orang Tua angkat wajib untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebagai syarat dalam pengadopsian anak, seperti :

- a) Dalam Permohonan izin pengangkatan anak, diajukan permohonan kepada Menteri dengan ketentuan harus ditulis tangan oleh pemohon di atas ke atas bermeterai cukup.
- b) Ditandatangani oleh Pemohon (suami-istri)

- c) Mencantumkan identitas dan asal usul anak yang akan diangkat. (jika sudah ada calon anak angkat) Kemudian, Dinas Sosial akan memberi rujukan pada calon orang tua angkat untuk menuju ke sebuah organisasi sosial atau yayasan sosial resmi yang dapat menindak lanjuti proses pelaksanaan pengadopsian anak.
- 2) Tahap Laporan Sosial Izin Pengasuhan Anak

Tahap ini calon orang tua angkat yang telah diberi rujukan ke organisasi sosial atau yayasan sosial oleh Dinas Sosial menyerahkan segala persyaratan yang telah mereka lengkapi kepada organisasi sosial atau yayasan sosial yang bersangkutan. Setelah segala kelengkapan persyaratan masuk ke organisasi sosial atau yayasan sosial, organisasi sosial atau yayasan sosial tersebut bersama Dinas Sosial memeriksa segala persyaratan tersebut dan melakukan wawancara serta kunjungan kepada calon orang tua angkat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon orang tua angkat tersebut. Apabila ada persyaratan yang dianggap belum memenuhi persyaratan, maka calon orang tua angkat wajib untuk segera melengkapinya. Tetapi, apabila segala persyaratan dan wawancara yang dilakukan oleh organisasi sosial atau yayasan sosial bersama dengan Dinas Sosial tersebut, dianggap sudah memenuhi standar, maka dibuatlah Laporan Sosial tentang izin Pengasuhan Anak. Laporan Sosial merupakan salah satu persyaratan penting bagi sah atau tidaknya sebuah proses pengangkatan anak. Laporan Sosial dibuat sebagai acuan bagi pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Laporan Sosial memuat berbagai informasi tentang calon anak angkat meliputi :

 - a) Identitas
 - b) Keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani
 - c) Keadaan keluarga (suami dan istri) dan lingkungannya
 - d) Keadaan ekonomi
 - e) Hubungan Sosial
 - f) Alasan dan tujuan pengangkatan anak

g) Kesimpulan

h) Rekomendasi

- 3) Tahap Pengesahan Izin Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri. Tahap ini SK yang keluar diserahkan kepada Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak dan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak memeriksa segala kelengkapan persyaratan dan SK tersebut. maka keluarlah SK Kepala Dinas Sosial tentang Izin Pengasuhan Anak. SK Kepala Dinas Sosial inilah yang dibawa ke organisasi Sosial untuk disahkan melalui Pengadilan Negeri. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri. Pada proses di pengadilan ini sebaiknya pihak calon orang Tua Angkat juga ikut serta.
- 4) Tahap pemberitahuan tentang izin pengangkatan anak kepada pihak-pihak yang terkait. Setelah hakim Pengadilan Negeri mengesahkan SK Kepala Dinas Sosial tersebut, maka SK tersebut diserahkan kepada organisasi sosial atau yayasan social, dari calon orang tua angkat tersebut, maka segera diberitahukan kepada calon orang tua angkat dan calon orang tua angkat sebaiknya segera melaporkan perihal tersebut kepada Dinas Kesejahteraan Sosial. Dengan disahkannya Surat Keputusan yang telah diberitahukan kepada pihak calon orang tua angkat serta orang tua adopsi dan Dinas Sosial, maka proses pengadopsian tersebut dinyatakan sudah selesai dan sah.

Sosialisasi diatas adalah sebuah proses penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Adapun terdapat beberapa jenis sosialisasi yaitu:

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat).

- 1) Sosialisasi primer. Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan

keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya.¹¹

Peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas didalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

2) Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

Berdasarkan hasil interview dengan Bpk. Eko Suhartono, Kepala Dinsos Kota Batu, yang ditemui peneliti di Dinas Sosial Batu Jl. Diponegoro 74 (Batu Galleria A1-A2) Batu, ditemukan data dari hasil interview, sebagai berikut:¹²

“fokus kami saat ini adalah pembangunan panti jompo dan panti asuhan untuk anak, mengenai pengangkatan anak pada intinya masyarakat memang tidak memohonkan ijin pengangkatan anak secara perorangan, hanya yang dari panti asuhan yang sudah mentaati Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sosialisasi kami lakukan di panti asuhan untuk sementara ini”

Kesimpulan hasil Wawancara dengan Eko Suhartono Kepala Dinsos Kota Batu yaitu, fokus Dinsos saat ini adalah pembangunan panti jompo dan panti asuhan untuk anak. Dinsos juga memang tidak pernah menerima permohonan ijin pengangkatan anak dari perorangan, hanya dari panti asuhan yang tertib.

¹¹Mansour Fakih, 1996, **Analisis Gender & Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 54.

¹²Wawancara dengan dengan Eko Suhartono, Kepala Dinsos Kota Batu, 14 Juli 2014.

Dinsos hanya melakukan sosialisasi di panti asuhan saja. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat disimpulkan, bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, seharusnya meliputi:

- a) orang perseorangan;
- b) lembaga pengasuhan;
- c) rumah sakit bersalin;
- d) praktek-praktek kebidanan; dan
- e) dan panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan:

”Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.”

Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat disimpulkan, bahwa, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Dinsos saja, melainkan dilakukan oleh masyarakat juga. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan:

”Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.”

Ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat disimpulkan, bahwa pengawasan oleh Dinsos, karena dinas Sosial merupakan kepanjangan dari pemerintah, yakni Kementrian sosial dulunya Departemen Sosial.

c. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor-faktor penegakan hukum di atas bisa dijadikan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum seyogyanya diposisikan sebagai bagian dari kebijakan publik yang artinya didukung oleh

d. Faktor sarana atau fasilitas.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, antara lain sarana untuk artikel, bulletin, surat kabar, majalah-majalah, akses internet, dan media elektronik lain sebagai sarana sosialisasi mengenai prosedur pengangkatan anak.

Sarana untuk bersosialisasi sebenarnya sudah ada banyak sekali di masa sekarang, Media massa yang terdiri dari media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, dan internet) merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Media massa diidentifikasi sebagai media sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku khalayaknya.

e. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Di dalam masyarakat khususnya Kota Batu pada kenyataannya masih ada yang tidak mengetahui ketentuan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinsos kepada masyarakat kota batu terutama di daerah pedesaan yang sangat jarang mendapatkan informasi sehingga masyarakat kota batu dalam Hal mengangkat anak ini tidak ada izin dari Dinsos. Ada pula sebagian masyarakat kota batu mengetahui peraturan tersebut tetapi tidak mau melaksanakan karena persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang lama, Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan peneliti di bagian latar belakang.

Hasil Wawancara yang dilakukan peneliti di daerah, Kota Batu. Terdapat pengangkatan Anak yang di angkat bernama “Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, dan bapak angkatnya bernama M. Sugeng Hariadi, berdasarkan Wawancara dengan M. Sugeng, dinyatakan :¹³

“anak saya ini bukan anak kandung saya, anak ini anak dari adik saya, alasan saya mengangkat anak adalah untuk pancingan agar punya

¹³Wawancara dengan bapak M.Sugeng Hariadi, Warga Kota Batu, 14 Juni 2014.

anak, karena saya menikah 4 tahun tidak dikaruniai anak. Kami tidak tahu mengenai ijin dari Dinsos untuk Pengangkatan anak ini”

Berdasarkan Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa pengangkatan anak yang biasa terjadi di masyarakat di Kota Batu, masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkat.

Hasil Wawancara lain yang dilakukan peneliti di daerah, Kota Batu. Terdapat pengangkatan . Anak yang di angkat bernama “Hardika Farobi Danu Kuncoro”, dan bapak angkatnya bernama Dedy wahyu Kuncoro, berdasarkan Wawancara dengan Bp. Dedy, dinyatakan:¹⁴

“anak laki-laki saya ini bukan anak kandung saya, anak ini anak dari adik istri saya, alasan saya mengangkat anak adalah untuk pancingan, karena saya menikah sudah tiga tahun namun dikaruniai anak. Kami tidak tahu mengenai ijin dari Dinsos untuk Pengangkatan anak ini”

Berdasarkan Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dilakukan antar saudara, yakni istri Dedy wahyu Kuncoro dengan adik perempuannya.

Hasil Wawancara lain yang dilakukan peneliti di daerah, Kota Batu. Terdapat pengangkatan Anak yang di angkat bernama “Nabila Atiqah Syahla”, dan bapak angkatnya bernama Hadi Wahyono, berdasarkan Wawancara dengan Bpk. Hadi Wahyono, dinyatakan :¹⁵

“anak laki-laki saya ini bukan anak kandung dari pernikahan saya dengan istri saya, anak ini anak dari adik istri saya, alasan saya mengangkat anak adalah untuk pancingan, sudah tiga tahun pernikahan kami belum dikaruniai anak. Kami tidak tahu mengenai ijin dari Dinsos untuk Pengangkatan anak ini”

Berdasarkan Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dilakukan antar saudara juga.

Hasil Wawancara lain yang dilakukan peneliti di daerah, Kota Batu, Terdapat pengangkatan anak yang di angkat bernama “Dearra Noor Izzati

¹⁴Wawancara dengan bapak Hardika Farobi Danu Kuncoro, Warga Kota Batu, 14 Juni 2014.

¹⁵Wawancara dengan bapak Hadi Wahyono, Warga Kota Batu, 14 Juni 2014.

Rahyana”, dan bapak angkatnya bernama Moh. Wildan Nurindar, berdasarkan Wawancara dengan Bpk. Moh. Wildan Nurindar, dinyatakan:¹⁶

“anak perempuan saya ini bukan anak kandung saya, anak ini anak adik perempuan saya, alasan saya mengangkat anak ini, karena kasihan melihat adik perempuan saya janda dengan 4 anak, saya juga tidak punya anak perempuan. Kami tidak tahu mengenai ijin dari Dinsos untuk Pengangkatan anak ini”

Berdasarkan Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dilakukan antar saudara juga, namun alasan mengangkat anak, karena masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.

Sangat disayangkan dari keseluruhan proses pembuatan akta kelahiran diatas tidak ada yang mematuhi peraturan perundangan, dari kesemuanya tidak ada yang mendapat izin dari Dinas sosial terlebih dahulu, malah lebih parahnya lagi anak angkat ini dimasukkan di dalam akta kelahiran sebagai anak kandung semuanya.

Pengangkatan anak menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

¹⁶Wawancara dengan bapak Moh. Wildan Nurindar, Warga Kota Batu, 14 Juni 2014.

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Ketentuan Pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di atas Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Instansi Sosial sebagaimana dimaksud adalah Dinas Sosial. Setelah Dinsos mensosialisasikan mengenai tahapan dalam perizinan yang kemudian melakukan pengawasan terhadap prosedur pengangkatan anak. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan: "Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:"

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat disimpulkan, bahwa pengawasan terhadap pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak dan bisa juga oleh lembaga perlindungan anak. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat disimpulkan, bahwa masyarakat dituntut peran aktifnya untuk mengawasi penyimpangan terhadap proses pengangkatan anak. Masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

Terdapat 5 Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin kepala Instansi Sosial sebelum proses pengangkatan anak. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor substansi hukum, Dalam hal Faktor substansi hukum sudah mengaturnya dengan jelas dan implisit dalam peraturan perundangan, namun tidak ada sanksi apabila melanggar ketentuan peraturan tersebut.
- 2) Faktor penegakan hukum, Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinsos hanya melakukan sosialisasi di panti asuhan saja. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat disimpulkan, bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, seharusnya meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga pengasuhan;
 - c. rumah sakit bersalin;
 - d. praktek-praktek kebidanan; dan
 - e. dan panti sosial pengasuhan anak.

Dalam hal ini membuktikan bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah, untuk melakukan penegakan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, antara lain sarana untuk akses internet, dan media elektronik lain sebagai sarana sosialisasi. Dalam hal ini Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, di Kota Batu sudah memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Di dalam masyarakat khususnya Kota Batu memang pengangkatan anak dilakukan secara langsung. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

5) Faktor kebudayaan

Masyarakat Kota Batu pada umumnya tidak membiasakan diri untuk mengajukan permohonan ijin kepada Dinas Sosial untuk melaksanakan pengangkatan anak. Hal ini menjadi kebiasaan atau budaya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat kota Batu, dimana ada sebagian masyarakat yang mengetahui peraturan mengenai pengangkatan anak khususnya pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 yang mengharuskan orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ke Dinas Sosial tetapi tidak melaksanakan peraturan tersebut.

Masyarakat kota Batu yang tidak melaksanakan peraturan mengenai pengangkatan anak tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain:

- a. Tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.
- b. Syarat pengajuan perijinan yang rumit.
- c. Proses pengajuan izin ke Dinsos yang lama.

Demikian Alasan masyarakat kota Batu dalam pengangkatan anak yang tanpa mengajukan izin dari Dinsos.

Simpulan

1. Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ijin dari Dinas sosial sebelum melakukan pengangkatan anak tidak berjalan dengan baik, dari kelima faktor penegakan hukum tersebut, yang memiliki kekurangan adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Berdasarkan Interview dapat disimpulkan bahwa warga Batu ini menginginkan sosialisasi yang dilakukan Dinas sosial dalam hal Tata cara pengangkatan anak dapat menyeluruh sampai kepada masyarakat terutama di daerah pedesaan agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur mengangkat anak yang benar itu sesuai dengan peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sorjono Soekanto, 1979, **Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat**, Academica, Jakarta.

Budiarto, Muhammad. 1991, **Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum**, Melton Putra, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1991, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya.